



# Jangan Lambat

# Eksekusi Anggaran



DOK: PROKOPIM PEMKAB MEMPAWAH

**DIPA** - Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, menerima DIPA APBN dan TKD Tahun Anggaran 2023 dari Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, didampingi Kakanwil DJPb Kalbar, Imik Eko Putro, di Pendopo Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (2/12).



pada masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan secara mudah cepat dan dekat, serta kegiatan ini menggunakan dana APBD Perubahan Tahun 2022,” katanya.

Ia juga menjelaskan, program Si ManTap ini juga menggandeng beberapa stakeholder sebagai mitra utama. Yang pertama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyedia data NIK yang akan diintegrasikan dalam data perpajakan daerah di Kabupaten Bengkayang.

Selanjutnya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang untuk mengintegrasikan data geospasial dan ZNT agar data PBB dan BPHTB dapat dipetakan secara jelas dan menghindari adanya data ganda ataupun data yang tidak valid.

Selanjutnya ada Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu yaitu untuk mengintegrasikan data persetujuan bangunan gedung khususnya data bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha.

“Lalu kami menggandeng mahasiswa terbaik dari Institut Shanti Bhuana untuk menjadi tim surveyor dalam rangka pemutakhiran data PBB perdesaan dan perkotaan dan surveyor BPHTB. Dan Bank Kalbar yang tentunya sebagai mitra pembayaran pajak daerah di Kabupaten Bengkayang,” ungkapnya.

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis saat membuka kegiatan Launcing dan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen BPHTB dan PBB-P2 ini menyampaikan, penerimaan pajak dari sektor pajak menjadi tolak ukur untuk mengukur tingkat ekonomi baik dalam skala

nasional daerah maupun lokal.

Penerimaan daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi pendongkrak penerimaan pendapat daerah pendorong akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Ia juga meminta agar optimalisasi pajak daerah harus terus dilakukan dalam upaya meningkatkan rasa keadilan di dalam masyarakat yaitu dengan keterlibatan seluruh komponen masyarakat wajib pajak dalam pembiayaan pembangunan melalui sistem perpajakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pelaksanaan pelayanan dan pembayaran pajak daerah di Kabupaten Bengkayang dapat berjalan dengan baik terletak pada kemampuan kita untuk melakukan inovasi dan reformasi,” ujarnya.

Si ManTap, kata Bupati, merupakan implementasi atas capaian kinerja yang masuk dalam agenda link control for pension mcp misi pemberantasan korupsi yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Ke depan saya berharap inovasi pajak daerah lebih dikembangkan dengan memperluas tempat-tempat pelayanan dan penambahan channel pembayaran, sehingga pelayanan pajak dapat dilakukan secara total dan menyeluruh,” katanya.

Bupati juga meminta setelah diresmikannya Si ManTap berbasis Geospasial dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat desa di wilayah Kabupaten Bengkayang. **(ril/nar)**



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2022	Hal.: 2																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Wabup Terima DIPA 2023 dari Gubernur

**MEMPAWAH, TRIBUN** - Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 dari Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Penyerahan DIPA tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji, didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kalbar, Imik Eko Putro, di Pendopo Kantor Gubernur Kalbar, pada Jumat (2/12).

Kegiatan tersebut mengusung Tema "APBN 2023 Optimis dan Tetap Waspada", dan dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Kalbar.

Wabup Muhammad Pagi mengatakan, ada beberapa pesan yang didapatnya ketika menerima DIPA bersama kepala pemerintah daerah lainnya.

"Jadi pada saat itu Bapak Gubernur sudah berpesan kepada seluruh kepala daerah di Kalbar agar tidak lambat dalam mengeksekusi anggaran, apalagi sampai lambat dalam penyerapan realisasi anggaran. Jadi diharapkan harus cepat," ujar Muhammad Pagi menyampaikan, Minggu (4/12).

Muhammad Pagi mengatakan, hal tersebut tentunya akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk cepat dalam eksekusi anggaran.

"Jadi tentunya kita Pemerintah Kabupaten Mempawah akan mengikuti arahan dan pesan dari Bapak Gubernur, yakni akan cepat dalam penyerapan realisasi anggaran, agar tidak mendapatkan sanksi," terangnya.

**Pembak  
Mempawah akan mengikuti arahan dan pesan dari Bapak Gubernur, yakni akan cepat dalam penyerapan realisasi anggaran, agar tidak mendapatkan sanksi.**

**M Pagi**  
Wakil Bupati Mempawah

Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, dalam kegiatan penyerahan DIPA tersebut menekankan kepada seluruh kepala daerah di Kalbar agar tidak lambat dalam mengeksekusi anggaran, apalagi sampai lambat dalam penyerapan realisasi anggaran.

Untuk tahun depan tambah Sutarmidji akan ada sanksi bagi daerah yang dengan sengaja memperlambat penyerapan realisasi anggaran.

"Tahun depan bakal ada sanksi dari Pemerintah Pusat bagi daerah yang penye-

rapannya lambat, saya lihat ada hal-hal yang bisa cepat tapi tidak dilakukan," terangnya.

Semisal, lanjut Sutarmidji, kegiatan yang tidak perlu tender namun bisa cepat dilaksanakan, seperti pelatihan, bimtek dan sebagainya.

"Yang jelas sanksi itu bakal merugikan, tidak ada sanksi itu menguntungkan daerah," tegas Sutarmidji.

Dalam momen tersebut, Sutarmidji juga menyinggung soal dampak situasi ketidakpastian global terhadap perekonomian seperti yang telah disampaikan Presiden RI saat penyerahan DIPA.

Namun ia meyakini Provinsi Kalbar akan dapat mengendalikan resiko inflasi. Asalkan Bupati/Wali Kota bekerja dengan data, maka hal itu bisa dihindari.

"Apalagi wilayah kita luas, pangan atau beras produksi kita juga sudah surplus, plus kegiatan ekonomi (UMKM) kita kuat," terangnya.

Dalam menghadapi dampak situasi ketidakpastian global terhadap perekonomian seperti yang telah disampaikan Presiden RI saat penyerahan DIPA kemarin, gubernur meyakini Provinsi Kalbar akan dapat mengendalikan resiko inflasi.

"Saya yakin jika Bupati/Wali Kota bekerja dengan data, saya rasa akan menghindari hal itu, karena wilayah kita luas, pangan atau beras produksi kita sudah surplus, kegiatan ekonomi (UMKM) kita kuat," tandas H Sutarmidji. (ram)